

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kelembagaan (*institutional*) merupakan sebutan yang lebih tinggi, mencakup perilaku dan struktur yang sejajar kedudukannya dengan sebutan organisasi. Sedangkan perilaku dibentuk dari norma, nilai, dan lain-lain. Sementara struktur berperan sebagai aspek statis yang menjamin berlangsungnya suatu kelembagaan. Kelembagaan bisa diartikan sebagai perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya. Kelembagaan tidak hanya sebatas hubungan kerja di dalam dan antar lembaga. Kartodihardjo (2006) menekankan bahwa kelembagaan juga dapat menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, rasa percaya, tindakan bersama, serta pengaruh hak-hak terhadap kearifan dalam pengelolaannya. Koentjaraningrat, (1997, h. 15) kata kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constituted*) di dalam masyarakat.

Ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pertama kali ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari disamping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga.

Tiga aspek yang mendukung keberlanjutan ekowisata, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Berdasarkan dengan UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, kinerja pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya dievaluasi berdasarkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga atas Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat, dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci.

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing-masing.

1) Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.

2) Kalangan Swasta (pelaku usaha/ industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan

3) Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (host), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya

Masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung

keberhasilan pembangunan. Pembangunan kepariwisataan dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan (Ir. Firmansyah Rahim, 2012)

Kegiatan Ekowisata di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2009. Secara umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dengan kegiatan wisata alam biasa, namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya.

Ekowisata mangrove Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dilatar belakangi oleh adanya hutan mangrove yang ada di muara sungai Desa Bancaran. Fungsi fisik dari hutan mangrove ini sebagai penjaga garis pantai dari abrasi agar tetap stabil, fungsi biologinya adalah sebagai pemijahan, daerah asuhan, dan untuk mencari makan ikan-ikan kecil. Sedangkan fungsi ekonomi dari hutan mangrove adalah sebagai lahan untuk produksi pangan dan penghasil kayu serta kegiatan ekonomi yang lainnya yang sifatnya pembangunan terbatas, misalnya ekowisata. Fungsi mangrove akan berjalan dengan baik jika manusia mampu memanfaatkannya dengan baik dan berkelanjutan.

Fakta yang terjadi pada hutan mangrove di Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya. Keberadaan hutan mangrove di Indonesia banyak mengalami penurunan fungsi dan manfaat dari waktu ke waktu. Penyebab utama dari kerusakan tersebut adalah aktivitas ekonomi manusia yang cenderung tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian alam. Beberapa di wilayah garis pantai Bangkalan berupa hutan mangrove yang sebagian berada dalam kondisi

rusak akibat tekanan aktivitas penduduk. Kerusakan tersebut memerlukan upaya - upaya penanganan yang tepat terkait hutan mangrove. Pemanfaatan potensi hutan mangrove yang tepat bukan saja akan membawa lingkungan yang baik dan berkelanjutan, namun juga akan membawa dampak baik pada masyarakat yang ada di daerah sekitar kawasan mangrove. Dampak yang dapat dirasakan langsung pada masyarakat misalnya dengan adanya program pengembangan ekowisata berbasis mangrove yang melibatkan masyarakat sekitar. Kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa, cinta tanah air, identitas nasional dan kesatuan, dan persahabatan internasional.

Pesisir muara sungai Bancaran yang secara endemik ditumbuhi pohon mangrove mempunyai potensi yang kuat untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Adanya kelompok masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan menjadi modal dalam menjaga keberlanjutan kegiatan ekowisata mangrove di daerah tersebut. Mengingat pentingnya keberlanjutan sebuah program, maka perlu adanya sinergi pembangunan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaannya

Menurut bapak Fikar selaku pengelola ekowisata mangrove Bancaran sementara, bahwa pembangunan ekowisata mangrove ini didasari dari kesadaran masyarakat Bangkalan khususnya kelompok nelayan, dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Bangkalan dimana kelompok kelompok tersebut memiliki ide tentang pengalihan hutan mangrove Bancaran ini dijadikan ekowisata. Bapak Fikar juga menuturkan bahwa dana dari wisata ini dari CSR (*corporate Social Responsibility*) dan juga ada dana

dari pemerintah setempat. Beliau mengatakan bahwa pembangunan wisata ini masih berjalan 15% dan bisa dimulai pada bulan ke enam. Beliau menambahkan bahwa di wisata ini (ekowisata mangrove Bancaran) juga akan ditambahkan dengan wisata edukasi tentang hewan ternak, dimana tempat wisata ini berada di depan kantor Dinas peternakan Kabupaten Bangkalan (wawancara, 27 Januari 2020). Program pengembangan ekowisata mangrove Bancaran tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bangkalan. Ekowisata mangrove Bancaran didasari dengan gagasan atau ide dari masyarakat sekitar dan diteruskan oleh istri Bupati Kabupaten Bangkalan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan dana dari CSR. Namun dalam perkembangannya kurang melibatkan peran masyarakat setempat.

Lokasi ekowisata mangrove Bancaran berlokasi di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini lebih tepatnya di aliran sungai Bancaran. Keadaan tempat wisata masih dalam proses pembersihan. Terdapat aliran sungai yang mengarah ke laut, dan ada dua bantaran sungai. Lokasi dipilih dalam penelitian ini karena di tempat wisata terdapat fenomena dimana pelaku pengembangan ekowisata mangrove bukan dari masyarakat sekitar, tetapi pelaku pengembangan dari pihak eksternal.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti karena adanya fenomena yaitu adanya kelembagaan yang kurang sesuai di lokasi penelitian yaitu idealnya pelaku aktif pengembang ekowisata mangrove di Kelurahan Bancaran adalah aparatur kelurahan beserta jajarannya, tokoh masyarakat, masyarakat setempat. Namun pada kenyataannya yang menjadi pelaku aktif justru pihak

eksternal yaitu Bupati beserta istri, BAPPEDA, Forum CSR dan Dinas lingkungan hidup, tanpa melibatkan Dinas pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka ada beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana aturan main (formal dan informal) yang terkait dengan pengembangan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Siapa saja pelaku dan peran pelaku dalam Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana hubungan antar pelaku pengembangan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pokok- pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya,yaitu:

1. Menganalisis aturan main (formal dan informal) apa saja yang berkaitan dengan pengembangan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan KabupatenBangkalan.
2. Menganalisis siapa saja pelaku dan peran pelaku dalam pengembangan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan KabupatenBangkalan
3. Menganalisis hubungan antar pelaku dalam mengembangkan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan

Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan teori kelembagaan

2. Praktis

- Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian bermanfaat untuk kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya dinas Pariwisata, BAPEDA, dan Badan lingkungan hidup dalam pengembangan ekowisata

- Bagi swasta

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak swasta, baik sebagai investor maupun penyumbang dana CSR

- Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat lokal selaku tuan rumah dan masyarakat umum selaku pengunjung.